



SUB BAGIAN HUMAS DAN TU KALAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI
SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang 25137 Tlp. 0751-40818 Fax 0751-40811.40817

Koran		Hlm
Haluan	✓	1
Padang Ekspres		
Singgalang		
Posmetro		
.....		

Tahun: 2017			
Bulan:			
Jan		Jul	✓
Feb		Agust	
Maret		Sep	
April		Okt	
Mei		Nov	
Jun		Des	

Tanggal				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31				

Pola Pemeriksaan BPK Dikeluhkan Gubernur

PADANG, HALUAN— Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mengeluhkan beberapa hal pada temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumbar 2016. Salah satu yang dikeluhkan Irwan adalah pola pemeriksaan *sampling*.

"Pola pendekatan BPK adalah *sampling*, walau untuk dinas tertentu tidak *sampling*, misalnya, dinas pendidikan, kesehatan, PU. Tapi, pada dinas pertanian, perkebunan, Sat Pol PP, kadang *disampling*, kadang tidak *disampling*. Ternyata, dinas yang tidak *disampling*, di dalamnya *disampling* juga, misalnya, dinas PU, ada ratusan paket proyek, *disampling* juga karena tidak mungkin semuanya diperiksa," ujar Irwan setelah memberikan kata sambutan pada acara diskusi grup terpumpun (FGD) dengan tema "Opini Pengelolaan Keuangan Negara yang Objektif dan Berkualitas" di Gubernur Sumbar, Selasa (11/7).

Menurut Irwan, kelemahan pola pendekatan *sampling* adalah bahwa, bisa jadi, penyimpangan dan pengungkapan keuangan terjadi pada tempat yang tidak *disampling*. Ia mencontohkan kasus SPJ Fiktif di Dinas PU Sumbar. Pada 2013, BPK memeriksa PU secara tidak *sampling*. Namun, pada bagian JSN (tersangka kasus SPJ fiktif pada 2016), BPK memeriksanya secara *sampling*, sedangkan teman-teman JSN

tidak *disampling*. Irwan mengaku tidak mengetahui bahwa JSN *disampling*, apalagi tidak ada laporan dari pihak lain, seperti masyarakat dan wartawan. "Kalau tahu dari 2014, 2015, langsung diselesaikan, tetapi baru tahu tahun kemarin. Itu kelemahan *disampling*. Kalau bisa semuanya diperiksa, tidak *sampling*," tuturnya.

Kelemahan kedua dari pola pemeriksaan *sampling*, kata Irwan, yang *disampling* bukan temuan, contohnya menaikkan harga (mark up) tiket. Pihaknya sudah memberikan sanksi kepada pelaku kasus tersebut. Namun, tahun depan setelah kasus itu, ada lagi kasus itu pada *sampling* yang lain. "Padahal, sebelumnya sudah ada kasus itu, tahun depannya ada lagi. Yang *disampling*, dia tidak lakukan *mark up* lagi, sedangkan yang belum ketahuan, dia coba-coba, ketika *disampling* ketahuan," ucapnya.

Hal lain yang dikeluhkan Irwan dari pemeriksaan BPK terhadap LKPD Sumbar 2016 adalah penilaian terhadap hibah bantuan sosial (bansos) kepada warga miskin. Hal itu berhubungan dengan definisi kemiskinan menurut BPK. Menurut Irwan, definisi kemiskinan berdasarkan pemeriksaan BPK tidak cocok untuk di Sumbar. "Kemiskinan, kalau di Jawa, rumah gedek, lantai tanah, atap rumbia. Apakah ada di Sumbar rumah seperti itu. Kalau ada, sangat jarang. Tetapi, orang yang isi rumahnya miskin, seperti petani, sepertiga hektare sawah, tiga sampai empat bulan panen, sekali panen dapat 6 ton sudah banyak, sedangkan jika panennya sepertiga cuma dua ton, tak sampai Rp1 juta sebulan, ya miskin. Dia dikasih hibah bansos karena dia miskin. Ini kejadian

2012. Diperiksa BPK, *disampling*, tersampling beberapa bantuan, disuruh mengembalikan bantuan itu karena dianggap tidak layak karena rumahnya bagus. Bagaimana cara menjelaskannya kalau indikator kemiskinan dilihat dari rumah. Betul rumahnya bagus, tetapi dia miskin karena pendapatannya kecil. Kami minta DPD memikirkan masalah ini," tuturnya.

Pada wawancara itu, Irwan juga menyampaikan masalah temuan BPK yang tindak lanjutnya bukan urusan Pemprov Sumbar, misalnya GOR Agus Salim yang merupakan aset Pemprov Sumbar. Aset anah itu masih temuan BPK karena masih tercatat milik BNI 46. "Masalah aset di GOR sampai sekarang belum selesai 100 persen dengan BNI. Ketika ditemui di BNI Jakarta, kami hanya bertemu dengan eselon bawah BNI sehingga masalah tidak putus-putus. Tukar gulungnya dulu tidak tuntas pada masa gubernur Pak Azwar Anas pada tahun 1982. Ini bukan salah saya karena masalah ini terjadi pada masa gubernur Azwar Anas. Mestinya dulu tuntas. Tuntas dengan maksud: tanah pemprov di kawasan by pass Padang dikasih ke BNI, dan tanah BNI di GOR dikasih ke pemprov. Kenyataannya, tanah di GOR dipakai pemprov, tapi sertifikatnya belum dikasih oleh BNI ke pemprov, sementara tanah di by pass dipakai BNI dan sertifikatnya sudah dikasih oleh pemprov ke BNI. Bagi BNI tidak masalah karena dia punya sertifikat tanah GOR dan tanah yang di by pass. Bagi pemprov masalah karena tidak punya sertifikat tanah GOR," ujar Irwan.

Irwan juga mengeluhkan kuranannya jumlah akuntan di

Pemrov Sumbar untuk mengu masalah keuangan. Menurut kekurangan akuntan itu terj karena jumlah tamatan akuntan yang masuk ke pemda sedi karena gajinya kecil. Kebanyal tamatan akuntansi bekerja di pe sahaan swasta karena gajinya be: "Karena kekurangan akunt kami minta akuntan dari BP pusat. Pertama, Zainud diangkat jadi staf ahli guberr langsung membentahi semua ke ngan. Harusnya dibuat penerir an baru akuntan untuk mengu keuangan di pemda," ucapnya.

Karena itu, Irwan mendukung diskusi tersebut sebab kegia itu bagus. Dari diskusi itu, pih nya bisa mengetahui persoa tindak lanjut temuan BPK. "Ka ada sesuatu yang diluar ke nangan pemprov, DPD bisa i ngusulkan ke pemerintah pu apakah presiden, BPK, kem terian terkait," katanya.

Diskusi tersebut digagas (Dewan Perwakilan Daerah (DF khususnya Komite IV yang ru lingkupnya bidang APBN, pa perimbangan keuangan pusat daerah, BPK, lembaga keuan; serta koperasi dan UMKM. W Ketua Komite IV DPD, Leon Harmainy, mengatakan, pihak ditugaskan untuk memba tindak lanjut hasil pemeriks BPK. Pihaknya akan menjad: tindak lanjut pemeriksaan I semester UU 2016 sebagai per bangan; bahan masukan da penyusunan pertimbangan I terhadap RUU APBN mendat rintisan sinergi pengawasan tir lanjut hasil pemeriks BPK. DPD dan DPRD. Sebelum pada Mei 2017, BPK menyat: ada sekitar Rp4,5 miliar c menyimpang dari 30 item ter pada LKPD Sumbar 2016. (h/